

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1660)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun
2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah

Keputusan Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 12 Tahun
1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan
Tanah

B. Buku

Grasella Shafiyah Putri, 2022
*MELAKSANAKAN PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 416 Pk/Pid.Sus/2019)*

124

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Achjani Zulfa, Eva, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus. Peringatan, Dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Chazawi, Adam, 2009, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberaran Dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Dipradja, R. Achmad Soema, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1995, *Delik-delik tersebar di luar KUHP dengan komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2014, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Junaidi, Heri, 2018, *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukanali Metodelogi Penelitian Yang Efisien dan Efektif Untuk Skripsi,Tesis dan Disertasi)*, CV.Amanah, Palembang.

- Lamintang. P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang. P.A.F. 2003, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mr. E. Utrecht, 1999, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo. R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Waluyo, Bambang, 2007, *Pidana dan ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175

C. Jurnal

- A. Sondakh, Heindra, 2014, *Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 Kuh Pidana*, Jurnal Lex Crime, Vol. III No. 4.
- B. Dagilaha, Yitzhak, 2019, *Peran Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Menurut Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crime, Vol. VIII No. 11.
- Effendi, Orien, 2020, *Asumsi Publik Terhadap Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Imunitas Pejabat Negara*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15 No.2.
- Hasbullah, 2017, *Perintah Atasan atau Jabatan (Ambtelijk Bevel) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol.1. No. 1.
- Lembong, Johnny dan Jeany Anita Kermite, 2021, *Perintah Jabatan Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dari Sudut Tugas Dan Keyakinan Perorangan*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IX No. 5.

D. Website

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/29/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-melorot-3-poin-pada-2020>, diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 18.28 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1395016/pantauan-icw-vonis-ringan-dan-bebas-koruptor-naik-signifikan-di-semester-i-2020/full&view=ok>, diakses pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 18.28 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5005012/kpk-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-40-kalah-dari-malaysia-singapura>, diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 11:55 WIB

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 18.36 WIB.

<https://www.antaraneews.com/berita/1430748/icw-terdakwa-korupsi-divonis-bebas-dan-lepas-pada-2019-meningkat>, diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 18.37 WIB

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/23/lztp-qj-inilah-3-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>, diakses pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 18.00 WIB.